



LAPORAN KINERJA (LKj) SATKER ICCTF 2021

Kedeputian Bidang Kemaritiman
dan Sumber Daya Alam

Januari 2022

LAPORAN KINERJA (LKj) SATKER ICCTF 2021

Kedeputian Bidang Kemaritiman
dan Sumber Daya Alam

Januari 2022



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Satuan Kerja (Satker) Majelis Wali Amanat (MWA) *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) Tahun 2021 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja ICCTF dibawah Kedeputan Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (selaku Ketua MWA ICCTF) melalui koordinasi Direktorat Kelautan dan Perikanan (selaku Koordinator MWA ICCTF). Hal ini sesuai dengan penetapan indikator kinerja Direktorat Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 pada Indikator SS 3.2: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti tentang Kebijakan Inovasi Pembangunan.

ICCTF mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan perubahan

iklim, sebagaimana tertera dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang disampaikan pada Tahun 2015 untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada Tahun 2030. Komitmen tersebut juga selaras dengan upaya Indonesia untuk merealisasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

LKj ini terdiri dari lima bagian, yaitu bagian pertama berisikan pendahuluan, bagian kedua memuat perencanaan kinerja, bagian ketiga memuat penjabaran akuntabilitas kinerja, bagian keempat merupakan penutup dan terakhir bagian kelima memuat lampiran yang berisikan detail dari tiap pelaksanaan tugas dan fungsi MWA ICCTF. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan ini. Masukan dan kritik sangat diharapkan bagi penyempurnaan laporan ini.

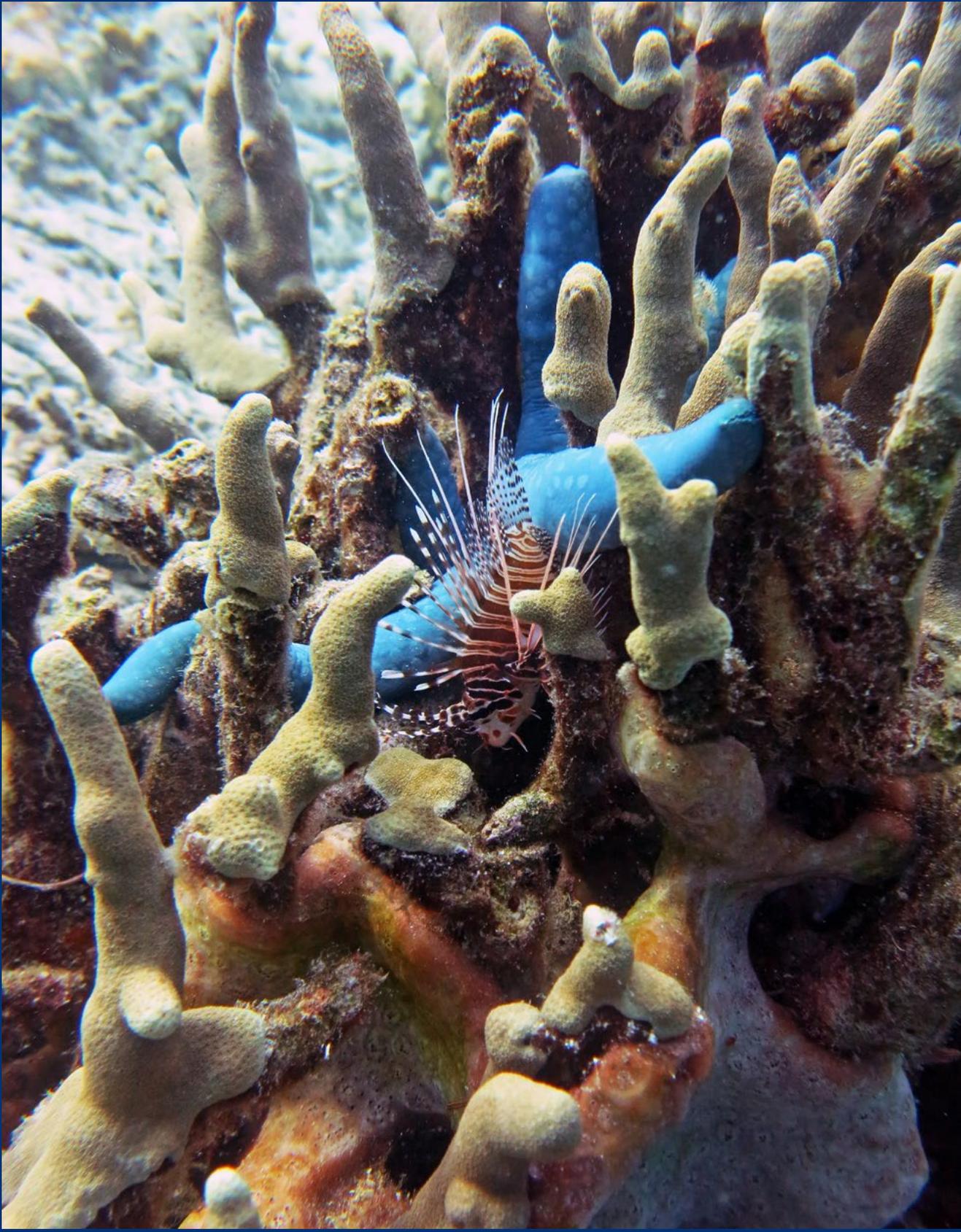
Jakarta, Januari 2022

Disusun oleh,
Koordinator ICCTF Direktorat Kelautan
dan Perikanan

Sri Yanti JS

Mengetahui,
Ketua MWA ICCTF
Deputi Bidang Kemaritiman
dan Sumber Daya Alam

Arifin Rudiyanto



Situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menjadikan target pembangunan nasional dan upaya percepatan ekonomi mengalami kelambatan. Sektor kelautan dan perikanan, sebagai salah satu sektor penggerak pembangunan, tidak terkecuali menerima dampak berat dari pandemi ini. Sebagai Satuan Kerja di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ICCTF mempunyai mandat untuk mendukung pemerintah dalam memerangi dan memitigasi masalah perubahan iklim serta melakukan aksi nyata untuk menghasilkan model inovasi pembangunan di bidang kelautan dan perikanan menuju sektor yang kokoh dan lepas dari kerentanan. Inovasi yang dilakukan diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pilar lingkungan, ekonomi dan sosial.

Dengan membaiknya kondisi pada Tahun 2021, menjadi kesempatan bagi ICCTF untuk menyusun rencana percepatan pencapaian target dari program-program yang dijalankan. Penyusunan rencana dan usaha percepatan pencapaian target juga mendapatkan dukungan Kementerian PPN/Bappenas melalui komunikasi dan monitoring yang intensif. Mekanisme ini mendorong adanya efektivitas organisasi yang menjadi faktor penting atas pencapaian-pencapaian ICCTF selama Tahun 2021.

Fokus program yang dilaksanakan oleh ICCTF pada Tahun 2021 antara lain: *Coral Reef*

Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) dengan dana hibah *World Bank (WB)* dan *Asian Development Bank (ADB)*, *Blended Finance*, *Blue Carbon* dan Bioekonomi. Secara umum, Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dibuktikan melalui persentase (100%) penyelesaian penugasan tertentu pada Satker ICCTF. Selain itu, ICCTF juga telah menyusun rekomendasi kebijakan percepatan pelaksanaan pembangunan untuk pengurangan dampak perubahan iklim pada sektor kelautan dan perikanan, berdasarkan praktik terbaik dan pembelajaran pelaksanaan kegiatan di lapangan serta berbagai kegiatan yang diselenggarakan dalam konteks penanganan isu perubahan iklim.

ICCTF juga mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024 untuk Program Prioritas PP4: Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan Dan Kelautan pada Prioritas Nasional PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, serta PP 3: Pembangunan Rendah Karbon pada Prioritas Nasional PN6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Dengan perkembangan dan capaian-capaian yang telah diraih, ICCTF dengan dukungan Kementerian PPN/Bappenas optimis dapat berkomitmen untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dan menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan dan pengelolaan program yang lebih baik di Tahun 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GAMBAR	8
I. PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Tujuan	11
1.3. Dasar Hukum	11
1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
1.4.1 Tugas dan Fungsi	12
1.4.2 Struktur Organisasi	12
1.5. Sumber Daya Manusia	14
1.6. Potensi dan Permasalahan Strategis	15
1.6.1 Potensi/Peran Strategi	15
1.6.2 Permasalahan Strategis	15
II. PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis 2020-2024	16
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	17
2.3. Rencana Kerja Tahun 2021	19
2.4. Alokasi Anggaran Tahun 2021	22

III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2021	23
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja (sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021)	24
3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja 2020 – 2021	40
3.1.2 Capaian Kinerja Lainnya	40
3.2. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2021	41
3.2.1 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021	41
3.2.2 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2021	43
3.2.3 Analisis Efisiensi Anggaran	43
3.3. Evaluasi Internal	44
IV. PENUTUP	45
4.1. Kesimpulan	45
4.2. Tindak Lanjut	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi SDM ICCTF Berdasarkan Umur dan <i>Gender</i> (orang)	14
Tabel 1.2	Komposisi SDM ICCTF Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)	14
Tabel 1.3	Komposisi SDM ICCTF Berdasarkan Sumber Pendanaan (orang)	14
Tabel 1.4	Komposisi SDM ICCTF Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang).	14
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja ICCTF sesuai IKU Direktorat Kelautan dan Perikanan (Pokja III Bidang Kelautan dan Perikanan) Tahun 2021	17
Tabel 2.2	Rencana Kerja ICCTF Tahun 2021	18
Tabel 2.3	Alokasi anggaran pencapaian Sasaran Strategis/Program ICCTF Tahun 2021	22
Tabel 3.1	Capaian ICCTF Tahun 2021 Berdasarkan IKU	23
Tabel 3.2	Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Kelautan dan Perikanan	25
Tabel 3.3	Status EKKP3K dan EVIKA pada 4 Kawasan Konservasi Perairan sampai dengan Akhir Tahun 2021	28
Tabel 3.4	Persandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2021 ICCTF (Dikoordinasikan oleh Direktorat Kelautan dan Perikanan) dan Target Jangka Menengah	40
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran ICCTF Tahun 2021	41
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran ICCTF di Satker Bappenas Tahun 2021	42
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Anggaran ICCTF Tahun 2020-2022	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi MWA ICCTF	13
Gambar 1.2	Struktur Organisasi ICCTF	13
Gambar 2.1	Contoh Rumusan Cascading IKU ICCTF	18
Gambar 3.1	Aset infrastruktur yang telah dibangun	29
Gambar 3.2	Jumlah pengikut sosial media ICCTF sampa dengan akhir Tahun 2021	40



1 Pendahuluan



1.1 Latar Belakang

LKj Satker ICCTF merupakan gambaran kinerja ICCTF sebagai instrumen untuk mendukung pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan akuntabel dengan fokus pada kebijakan inovasi pembangunan yang kemudian dijalankan/dikoordinasikan oleh K/L dan *stakeholder* pembangunan lainnya. ICCTF memobilisasi, mengelola, dan mengalokasikan pendanaan yang selaras dengan prioritas pembangunan agar dapat berkontribusi secara efisien dan efektif dalam pelaksanaan langkah-langkah mitigasi emisi GRK dan kegiatan adaptasi perubahan iklim, serta pengarusutamaan isu perubahan iklim ke tingkat nasional, provinsi dan perencanaan pembangunan daerah. Secara keseluruhan, ICCTF mendukung koordinasi pendanaan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

Dasar hukum pembentukan ICCTF adalah Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.44/M. PPN/09/2009. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 111 Tahun 2018 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*, terdapat 3 (tiga) struktur kelompok kerja (Pokja), yang terdiri dari: Pokja I di bidang program dan kegiatan strategis dan inovasi

untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim pada sektor kehutanan dan lahan gambut, industri, transportasi, dan limbah. Pokja II, mengatur bidang program dan kegiatan strategis dan inovatif untuk peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim pada sektor energi baru dan terbarukan. Serta, Pokja III di bidang program dan kegiatan strategis dan inovatif untuk peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim pada sektor kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2020, kemudian terjadi perubahan kebijakan dan kegiatan prioritas Kementerian PPN/ Bappenas dimana Pokja I dan Pokja II melaksanakan kegiatan mandiri yang terpisah dari program kerja ICCTF dan dikoordinasikan langsung oleh Direktorat Lingkungan Hidup dan Direktorat Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan. Pokja I telah menginisiasi kegiatan mandiri berupa Pembangunan Rendah Karbon/*Low Carbon Development Initiatives*. Sedangkan Pokja II melanjutkan Penyiapan Proyek Energi Terbarukan serta Kerja Sama Pendanaan dan Pengembangan Proyek Energi Terbarukan. Oleh karena itu, pada LKj MWA ICCTF Tahun 2021 ini akan memuat pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja III saja dibawah koordinasi Direktorat Kelautan dan Perikanan selaku Koordinator ICCTF Tahun 2021.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Satker ICCTF Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Penyajian capaian atas indikator kinerja ICCTF Tahun 2021
2. Penyajian capaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran ICCTF Tahun 2021

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja dalam lingkup Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Kepala Bappenas Tahun 2020-2024.

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.4.1 Tugas dan Fungsi

Lembaga Wali Amanat merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh K/L untuk mengelola Dana Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah. Kementerian PPN/Bappenas memiliki Majelis Wali Amanat dalam pengelolaan dana hibah yang masuk ke pemerintah yang kemudian dituangkan ke dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 111 Tahun 2018 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*. MWA ICCTF memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan pengelola dana amanat;
- b. Menetapkan kebijakan pelaksanaan program, melaksanakan kegiatan dan mengelola dana sebagaimana disepakati dalam perjanjian hibah;
- c. Memilih dan menetapkan Direktur Eksekutif;
- d. Menetapkan rencana kerja dan penganggaran kegiatan berkala;
- e. Menyusun laporan keuangan Indonesia Climate Change Trust Fund;
- f. Melakukan penarikan dana Hibah dari Pemberi Hibah;
- g. Memerintahkan pembayaran Dana Perwalian kepada pihak-pihak yang terkait; dan
- h. Melakukan proses pengadaan barang/jasa.

1.4.2 Struktur Organisasi

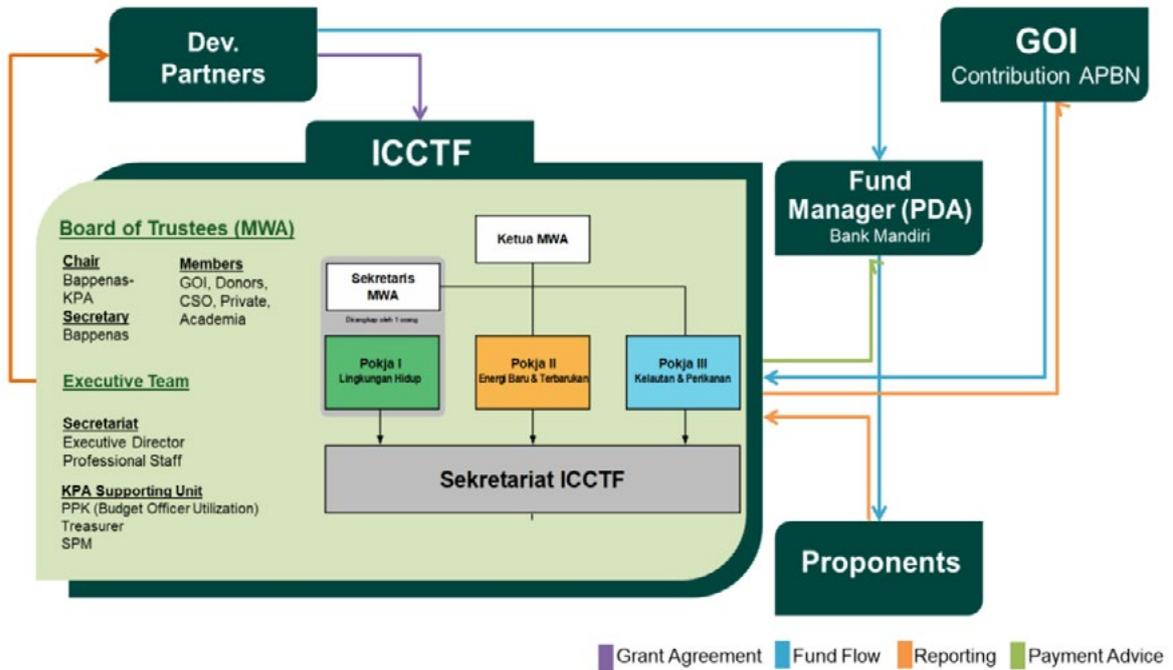
Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 111 Tahun

2018, struktur MWA ICCTF terbagi menjadi 3 (tiga) Pokja, yaitu:

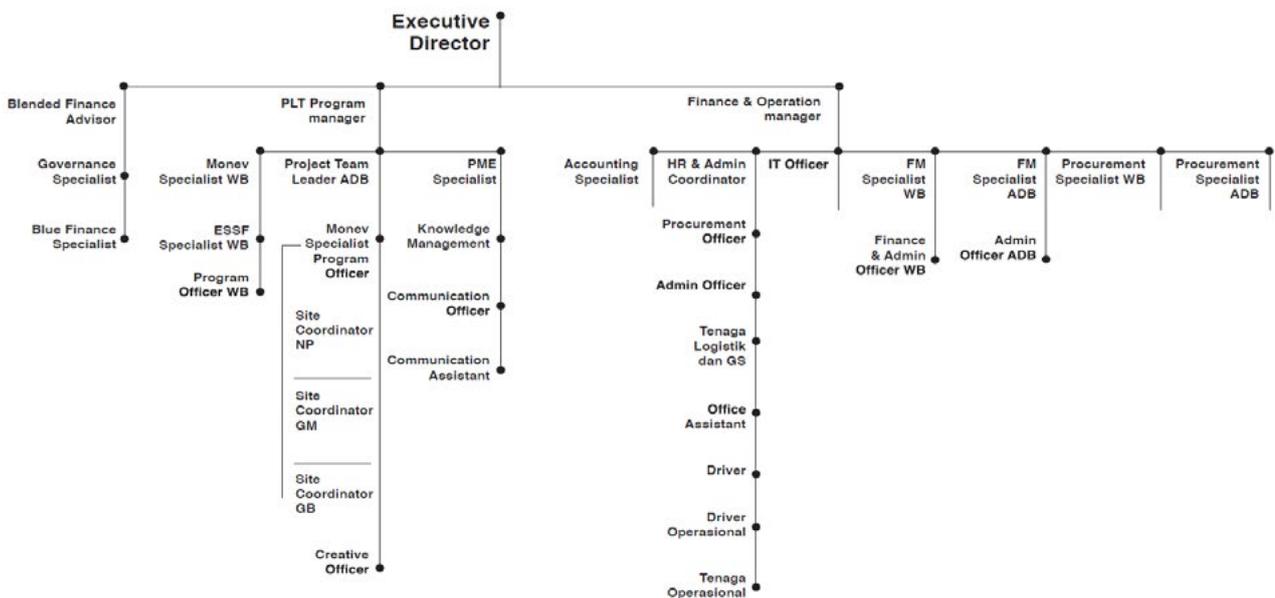
1. **Pokja I** yang dikoordinasikan oleh Direktorat Lingkungan Hidup, yaitu pada bidang program dan kegiatan strategis dan inovatif untuk:
 - a. pengurangan emisi gas rumah kaca; dan
 - b. peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim pada sektor kehutanan dan lahan gambut, industri, transportasi, limbah, dan sektor lain sesuai arahan MWA.
2. **Pokja II** yang dikoordinasikan oleh Direktorat Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertambangan, yaitu pada bidang program dan kegiatan strategis dan inovatif untuk peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim pada sektor energi baru dan terbarukan serta sektor lain sesuai arahan MWA;
3. **Pokja III** yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kelautan dan Perikanan, yaitu pada bidang program dan kegiatan strategis dan inovatif untuk peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim pada sector kelautan dan perikanan serta sektor lain sesuai arahan MWA.

Sejak Tahun 2020, sesuai dengan perubahan kebijakan dan kegiatan prioritas Kementerian PPN/Bappenas maka Pokja I dan Pokja II melaksanakan kegiatan mandiri yang terpisah dari program kerja ICCTF serta dikoordinasikan langsung oleh masing-masing Direktorat Lingkungan Hidup serta Direktorat Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan. Dimana Pokja I telah menginisiasi kegiatan mandiri berupa Pembangunan Rendah Karbon (*Low*

Carbon Development Initiatives). Sedangkan Pokja II melanjutkan Penyiapan Proyek Energi Terbarukan (Project Pipeline) serta Kerja Sama Pendanaan dan Pengembangan Proyek Energi Terbarukan. Oleh karena itu, saat ini ICCTF melalui dukungan Sekretariat menitikberatkan pada program Pokja III Bidang Kelautan dan Perikanan di bawah koordinasi Direktorat Kelautan dan Perikanan.



Gambar 1.1 | Struktur Organisasi MWA ICCTF



Gambar 1.2 | Struktur Organisasi ICCTF

1.5 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, ICCTF memiliki sumber daya manusia (SDM) sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan seluruhnya merupakan non-PNS. Sampai dengan Bulan Desember 2021, 3 (tiga) orang telah habis masa kontraknya dan 3 (tiga) orang mengundurkan diri, sehingga jumlah SDM ICCTF pada akhir Tahun 2021 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang. Rincian komposisi SDM ICCTF dapat dilihat pada **Tabel 1.1 – 1.4**.

Sejak pertengahan Maret 2020, ICCTF menerapkan Sistem Kerja dari Rumah/*Work From Home (WFH)* dan Sistem Kerja dari Kantor/*Work From Office (WFO)* secara bergiliran terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Pada Tahun 2021 ini, seluruh pegawai ICCTF yang mendapat persetujuan dokter untuk divaksin, telah divaksin bersama dengan pegawai Kementerian PPN/Bappenas lainnya untuk mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19.

Tabel 1.1 | Komposisi SDM ICCTF Berdasarkan Umur dan Gender (orang)

Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
< 30	5	4	9
31 – 40	9	3	12
41 – 50	3	4	7
> 50	4	-	4
Total	21	11	32

Tabel 1.2 | Komposisi SDM ICCTF Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)

Status Kepegawaian	Jumlah
Jasa Konsultan	22
Jasa Lainnya	10
Total	32

Tabel 1.3 | Komposisi SDM ICCTF Berdasarkan Sumber Pembiayaan (orang)

Sumber Pembiayaan	Jumlah
APBN	20
WB	4
ADB	8
Total	32

Tabel 1.4 | Komposisi SDM ICCTF Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S-3	1
S-2	4
S-1	23
SMA	4
Total	32

1.6 Potensi dan Permasalahan Strategis

1.6.1 Potensi/Peran Strategi

ICCTF merupakan satu-satunya lembaga dana perwalian yang berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam melaksanakan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pengelolaan pendanaan yang berasal dari dalam dan luar negeri (hibah). ICCTF juga turut berfungsi sebagai instrumen pendukung pemerintah dalam menghasilkan perencanaan percepatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkualitas, salah satunya dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan dibidang perubahan iklim (khususnya Tahun 2021 pada sektor kelautan dan perikanan) sebagai masukan bagi perumusan kebijakan, untuk kemudian dikoordinasikan dengan K/L dan *stakeholder* pembangunan lainnya.

ICCTF memobilisasi, mengelola, dan mengalokasikan pendanaan yang selaras dengan prioritas pembangunan agar dapat berkontribusi secara efisien dan efektif dalam pelaksanaan langkah-langkah mitigasi emisi GRK dan kegiatan

adaptasi perubahan iklim, serta pengarusutamaan isu perubahan iklim ke tingkat nasional, provinsi dan perencanaan pembangunan daerah. Secara keseluruhan, ICCTF mendukung koordinasi pendanaan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

1.6.2 Permasalahan Strategis

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2021, kendala utama yang dihadapi adalah pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi ini adalah mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan serta tidak dapat terlaksananya beberapa kegiatan di lapangan dan melibatkan khalayak ramai. Untuk menanggapi permasalahan ini, ICCTF telah melaksanakan revisi rencana kerja dan anggaran beserta penyesuaian waktu pelaksanaannya. Selain itu, ICCTF senantiasa melaksanakan penerapan kegiatan berdasarkan protokol COVID-19 yang ketat baik untuk pelaksanaan kegiatan operasional sekretariat maupun pelaksanaan proyek di lapangan.





2.1 Rencana Strategis 2020-2024

ICCTF memiliki sasaran program/kegiatan yang disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja yang telah disusun pada Tahun 2021. Sasaran program pada LKj yang disusun Tahun 2021 ini mengacu pada tugas dan fungsi ICCTF yaitu mendukung rekomendasi kebijakan dan inovasi untuk perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan akuntabel (khususnya dibidang Perubahan Iklim sektor Kelautan dan Perikanan) sesuai dengan indikator SS 3.2, yaitu Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti tentang Kebijakan Inovasi Pembangunan.

Beberapa kegiatan yang menjadi fokus ICCTF untuk dilaksanakan di dalam rencana kerja Tahun 2020 - 2024, yaitu:

1. Fasilitasi dan pengembangan pendanaan berkelanjutan untuk perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam. Pendanaan berkelanjutan ini merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan pendanaan pembangunan perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam yang masih sangat bergantung pada anggaran negara (APBN). Program ini juga mendukung kegiatan pada tingkat pusat maupun daerah untuk membangun sektor-sektor yang berhubungan dengan perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam. Serta berperan sebagai *hub* dalam bidang pendanaan bagi para pemangku kepentingan untuk menyukseskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

2. Implementasi pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan dalam kerangka penanganan perubahan iklim. Kegiatan ini dilakukan melalui pengembangan model percontohan dan pendampingan dalam pengelolaan Kawasan konservasi di 4 provinsi melalui program COREMAP-CTI.
3. Pengembangan platform dalam mendukung implementasi karbon pesisir (*blue carbon*). Platform ini akan berfungsi sebagai upaya untuk mengarusutamakan berbagai inisiatif dan rencana kebijakan terkait inisiatif *blue carbon* dalam skema perencanaan pembangunan Indonesia khususnya di bidang ekosistem pesisir dan lautan. Platform ini diharapkan dapat mengintegrasikan upaya adaptasi dan mitigasi dengan memperkuat kerjasama sama antar lembaga, terutama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Penyusunan Aksi Strategis dan Peta Jalan perikanan budidaya khususnya udang di Indonesia melalui program *Towards Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME)*. Proyek ini didanai oleh GEF melalui ADB dan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian PPN/Bappenas di Indonesia serta Kementerian Pertanian dan Perikanan di Timor Leste dengan durasi proyek selama 5 Tahun.
5. Dukungan Kesekretariatan merupakan program rutin dalam rangka melaksanakan kegiatan komunikasi strategis dan dukungan operasional ICCTF. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara terus-menerus guna mendukung pelaksanaan seluruh program kerja lainnya pada Tahun 2020 – 2024 mendatang.

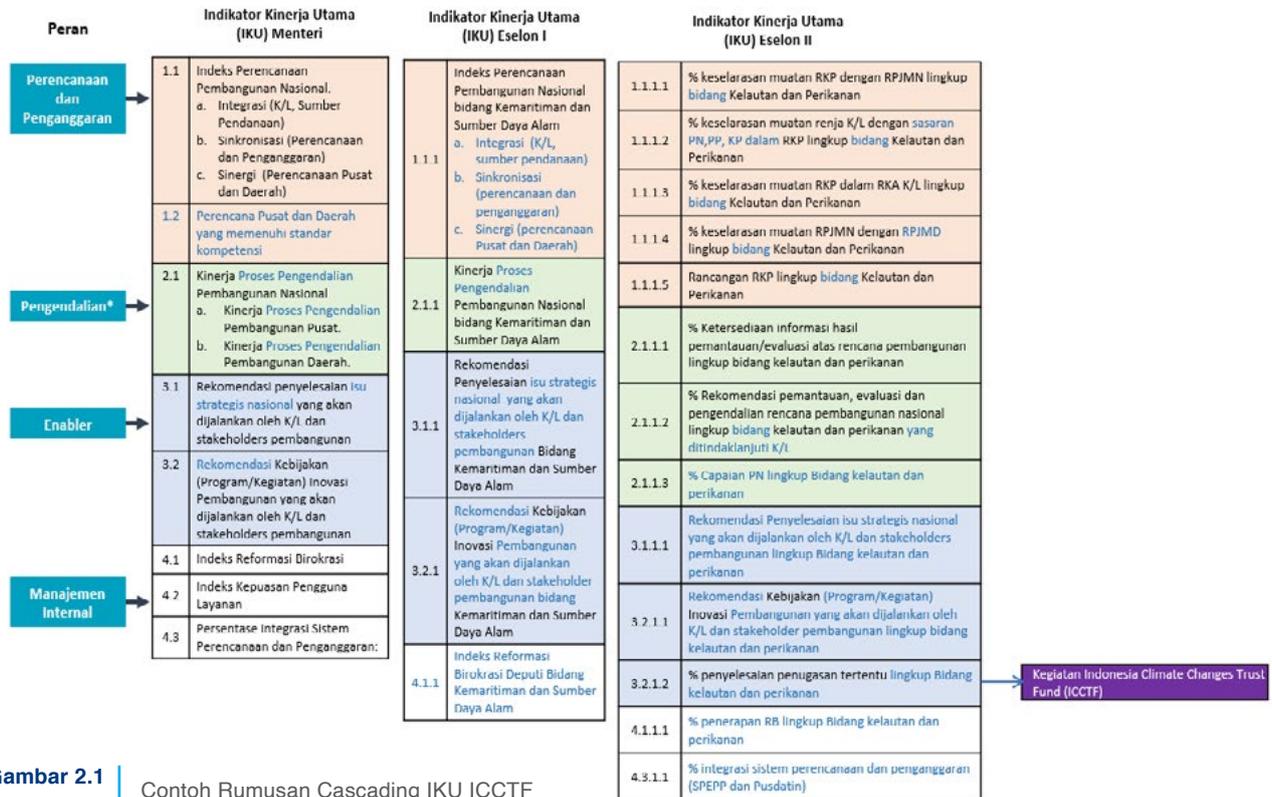
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis/Program ICCTF Tahun 2021 telah diturunkan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri dan diturunkan hingga level Eselon II (dalam LKj Eselon I), dan cascading dari IKU Eselon I diturunkan hingga level Eselon III (dalam LKj Eselon II). Terdapat indikator untuk setiap Sasaran Strategis/Program sebagaimana ditunjukkan oleh **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1 | Perjanjian Kinerja ICCTF sesuai IKU Direktorat Kelautan dan Perikanan (Pokja III Bidang Kelautan dan Perikanan) Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan/Output	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
IV	Sasaran Strategis/Program 3: Terwujudnya Kebijakan Pembangunan yang Visioner		
	Indikator SS 3.2 Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam		
1	Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Deputi	80-84,90%

Direktorat Kelautan dan Perikanan melalui ICCTF mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang salah satunya pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam. Cascading IKU unit kerja Kedeputusan KSDA ke unit kerja Direktorat Kelautan dan Perikanan lalu ke ICCTF dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1 | Contoh Rumusan Cascading IKU ICCTF

Dalam hal penilaian kinerja, kinerja unit kerja dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja unit kerja tersebut. Penugasan setiap individu merupakan hasil turunan dari indikator kinerja utama (Cascading IKU). Cascading IKU dilakukan secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan level kewenangan dan tanggung jawab unit kerja. Pemetaan tersebut kemudian dituangkan dalam Rumusan Kerja di masing unit dengan pembagian sumber daya manusia berdasarkan rencana waktu, pelaksanaan kegiatan bulanan serta Tahunnya.

Berdasarkan Cascading IKU dan pembagian peran tugas maka Kegiatan ICCTF Tahun 2021 berfokus pada:

- a. COREMAP - CTI, merupakan salah satu upaya nyata dari pemerintah Indonesia untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan pesisir serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program COREMAP-CTI WB mendanai 6 (enam) program yang berlokasi di Laut Sawu – NTT dan Raja Ampat – Papua Barat. Program COREMAP-CTI ADB mendanai 6 (enam) program yang berlokasi di Nusa Penida – Bali serta Gili Matra dan Gili

- Balu – NTB, termasuk kegiatan kajian *Supply Chain Tuna, Snapper dan Seaweed*, serta beasiswa *Master Degree Program (S2)*;
- b. *Blended Finance*, merupakan salah satu inovasi strategi untuk pembiayaan terkait pesisir dan laut khususnya pendanaan inovatif untuk investasi yang mendukung target-target *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan *Sustainable Blue Finance Institution (SBFI)* melalui dukungan Problue Program World Bank;
- c. *Blue Carbon*, merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung pengembangan kerangka strategi karbon biru Indonesia/*Indonesia Blue Carbon Strategy Framework* yang dapat diimplementasikan oleh Kementerian/ Lembaga dalam pengembangan karbon biru. Kejadiannya berupa *Policy Dialogue* melalui dukungan DISER Australia dan pengembangan proposal pendanaan karbon biru;
- d. Bioekonomi, merupakan salah satu kajian untuk untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait jumlah armada optimal, *resource rent tax/penerimaan negara bukan pajak (PNBP)*, serta instrumen pengendalian pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Kejadiannya berupa kajian bioekonomi perikanan udang di Laut Arafura, serta *workshop* nasional dan *shortcourse* bioekonomi.

2.3. Rencana Kerja Tahun 2021

Rencana Kerja ICCTF pada Tahun 2021 adalah mendukung proyek-proyek sesuai dengan fokus area dan program untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran atas aksi perubahan iklim terutama pada Sektor Kelautan dan Perikanan, melalui berbagai kegiatan dan penjangkauan informasi. ICCTF diharapkan menciptakan wadah pembangunan partisipatif dengan prinsip *Thematic, Holistic, Inter-connected, dan Spatial*. Ini sejalan dengan fungsi Bappenas sebagai Enabler dan menciptakan model-model inovasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam pengembangan Kawasan konservasi perairan secara terpadu.

Anggaran dana Rupiah Murni yang dialokasikan melalui ICCTF diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pendampingan terhadap program

hibah COREMAP-CTI WB dan ADB, serta mendukung inisiasi program-program inovatif dalam bidang *Blended finance, Blue carbon* dan Bioekonomi, termasuk *fundraising* dan penjangkauan komunikasi, serta operasional Satker MWA ICCTF. Selanjutnya kegiatan utama ICCTF akan didukung dari dana Hibah Luar Negeri, yang pada Tahun 2021 sudah dialokasikan untuk Hibah WB dan Hibah ADB. Hasil dari kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi Direktorat Kelautan dan Perikanan serta unit terkait di Bappenas dalam menyusun kebijakan (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah serta memberikan rekomendasi model inovatif pembangunan pengelolaan kelautan dan perikanan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ICCTF pada Tahun 2021 dalam mencapai *output* dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2 | Rencana Kerja ICCTF Tahun 2021

<p>Sub Komponen 1: 643-A</p>  <p>Kegiatan Pendampingan Proyek Hibah ICCTF (Rupiah Murni)</p>	<p>Siklus proyek ICCTF</p> <p>Terlaksananya kegiatan kegiatan Pendampingan Proyek Hibah COREMAP-CTI; kegiatan pendampingan program Blended Finance; kegiatan pendampingan program Blue Carbon; dan kegiatan pendampingan program Bioekonomi; serta Workshop Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan</p> <p>Jumlah program/proyek terkait</p> <p>Sebanyak 12 (dua belas) program/project terlaksana melalui pendanaan Hibah Luar Negeri yang didanai oleh ICCTF</p> <p>Persentase (%) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program</p> <p>Sebanyak dua (2) kali pemantauan lapangan untuk masing-masing program pendanaan hibah LN untuk memantau tingkat pelaksanaan program dan keuangan</p>
<p>Sub Komponen 2: 643-B</p> <p>Kegiatan <i>Fund Raising</i> dan Komunikasi (Rupiah Murni)</p> 	<p>Jumlah Rekomendasi pengembangan proposal ICCTF sesuai dengan <i>thematic windows marine based</i> dengan minimum 2 (dua) proposal/kajian untuk mengakses pendanaan internasional</p> <p>Penyelenggaraan kegiatan dukungan pendanaan perubahan iklim (<i>fundraising</i>) dengan keluaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dua (2) kali pertemuan penyusunan proposal - Dua (2) kali kegiatan negosiasi internasional untuk <i>fundraising</i> <p>Jumlah kegiatan <i>communication/outreach</i> yang telah dilaksanakan oleh ICCTF melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dua (2) kali mengikuti penyelenggaraan event nasional/Exhibition - Satu (1) kali <i>Public Campaign, Communication Outreach & Capacity Building</i> - Satu (1) kali kunjungan ke lokasi pelaksanaan proyek ICCTF bersama dengan media (media visit) - Satu (1) kali Video/ Materi Komunikasi Interaktif

Sub Komponen 3:

643-C



Dukungan
Operasional
ICCTF
(Rupiah Murni)

Terlaksananya Rapat Koordinasi meliputi Rapat MWA ICCTF, Rapat Internal, dan Rapat Penyusunan Laporan

Terlaksananya kegiatan Dukungan Personil (*Strategic Meeting & Capacity Development*, Tenaga Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya, dan Honor Output kegiatan COREMAP-CTI WB & ADB); dan Dukungan Kegiatan Operasional ICCTF (Kebutuhan Perkantoran, ATK, dan IT (Komputer, Audio Visual, dll))

Tersusunnya laporan kinerja keuangan dan program untuk disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas

Sub Komponen 1:

644-A

Dana Hibah
COREMAP-CTI WB

Laporan pembangunan aset infrastruktur ekowisata kecil di wilayah target

Laporan penguatan POKMASWAS yang melakukan pengawasan rutin di wilayah target

Laporan implementasi kegiatan sesuai rencana aksi RZWP3K provinsi di wilayah target

Laporan implementasi Jumlah Rencana Aksi Nasional untuk Hiu, Cetacea, dan Pari Manta di wilayah target

Sub Komponen 1:

644-B

Dana Hibah
COREMAP-CTI ADB

Laporan pelaksanaan Penguatan Lembaga dan Manajemen Terumbu Karang (Manajemen Kawasan Konservasi Perairan)

Laporan pelaksanaan Penguatan Lembaga dan Manajemen Terumbu Karang (Ekowisata)

Laporan pelaksanaan Pengembangan kapasitas (Program Beasiswa dan Pelatihan)

Laporan pelaksanaan Rencana pengelolaan sumberdaya berbasis ekosistem

Laporan pelaksanaan Rencana pengelolaan sumberdaya berbasis ekosistem

2.4. Alokasi Anggaran Tahun 2021

ICCTF secara rutin mengadministrasikan, menyiapkan, dan melaporkan semua kegiatan pelaksanaan secara tertib dan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Pelaksanaan program dan kegiatan ICCTF mendapatkan dukungan yang berasal dari rupiah murni APBN serta pendanaan hibah luar negeri. Anggaran DIPA untuk Kegiatan ICCTF tercatat di 2 (dua) Satker, yaitu Satuan MWA ICCTF sendiri dan Satker Bappenas, sehingga total anggaran yang dikelola oleh Satuan Kerja Majelis Wali Amanat ICCTF menjadi Rp 80 Miliar, dengan alokasi di Satker ICCTF sebesar Rp 56 Miliar dan alokasi di Satker Bappenas adalah Rp 24 Miliar. Adapun rincian alokasi anggaran ICCTF Tahun Anggaran 2021 dapat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3 | Alokasi anggaran pencapaian Sasaran Strategis/Program ICCTF Tahun 2021

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Kegiatan	Kode Output	Kode Komponen	Sub Komponen	Uraian Sub Komponen	Pagu
1	017312	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	6260	EAC	655	T	PPK PPN XIV (ICCTF)	Rp 700.000.000
2	017312	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	6260	EAA	002	E	Layanan Perkantoran ICCTF	Rp 655.100.000
3	017312	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	6259	EAB	647	D	ICCTF	Rp 2.800.912.000
4	017312	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	6271	AEA	903	CR	Lintas Bidang	Rp 100.000.000
5	966010	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	6264	ABS	301	A-C	Kegiatan Dukungan Satker Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ ICCTF	Rp 6.392.015.000
6	966010	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	6264	ABS	301	D	Dana Hibah COREMAP-CTI WB	Rp 51.017.769.000
7	966010	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	2935	ABS	301	E	Dana Hibah COREMAP-CTI ADB	Rp 19.170.000.000
TOTAL								Rp 80.835.796.000



3.1. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2021

Kegiatan pada Tahun 2021 pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan-kegiatan Tahun sebelumnya, namun dengan fokus yang berbeda. Masing-masing kegiatan yang direncanakan di Tahun 2021 secara umum sudah tercapai realisasinya. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 | Capaian ICCTF Tahun 2021 Berdasarkan IKU

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
% Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan nasional yang dijalankan K/L lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Deputi	80-84,90%	100%	100%

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja (sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021)

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran dari hasil proses pencapaian kinerja. Pada Tahun 2021 Direktorat Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 (Tabel 2). Adapun uraian capaian sasaran kinerja organisasi ICCTF tersebut diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Program 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner

Tercapainya atau tidaknya Sasaran Strategis/Program 3 diukur berdasarkan atas Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L bilingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Deputi. Rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L bertujuan untuk mengukur tingkat inovasi pembangunan yang dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan program pembangunan nasional. Inovasi pembangunan adalah program/kegiatan

yang menghasilkan kebijakan pembangunan baru diinisiasi serta dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. ICCTF selaku lembaga dana perwalian yang berfungsi sebagai instrument pemerintah dalam melaksanakan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Fokus Program yang dilaksanakan oleh Pokja III ICCTF antara lain COREMAP-CTI, *Blended Finance*, *Blue Carbon*, dan Bioekonomi. Adapun rekomendasi dari kegiatan dijalankan oleh K/L tersebut antara lain:

1. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi
2. Inisiasi Pendanaan Inovatif untuk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
3. Kebijakan Pengelolaan *Blue Carbon*
4. Kebijakan Pengelolaan WPP

Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dihitung berdasarkan seberapa besar rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan yang dijalankan oleh K/L. Pemetaan untuk rekomendasi penyelesaian kebijakan inovasi pembangunan nasional bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 | Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Kelautan dan Perikanan

No	Rekomendasi	Rekomendasi yang Dijalankan	%
1	Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi RZWP3K • Pengembangan sistem aplikasi pengumpulan data populasi jenis terancam untuk masukan rencana pengelolaan • Dukungan operasional POKMASWAS untuk pengawasan kawasan konservasi • Pemberian akses pengelolaan sumber daya perikanan kepada masyarakat adat • Pengembangan sarana <i>mobile cold storage</i> dengan <i>solar system</i> • Pengembangan wisata berbasis spesies untuk pemanfaatan Kawasan Konservasi berkelanjutan • <i>Payment Ecosystem Services</i> (PES) yang berkelanjutan • Integrasi <i>Tourist Management Sistem</i> (TMS) dengan <i>Payment Ecosystem Services</i> (PES) • Kajian Rantai Pasok tiga komoditas kelautan dan perikanan Tuna, Kakap dan Rumput laut 	100%

No	Rekomendasi	Rekomendasi yang Dijalankan	%
2			
Inisiasi Pendanaan Inovatif untuk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan			
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Blue Finance Policy Note: Financing options for small-medium fisheries enterprise and marine conservation in Indonesia</i> • <i>Advisory panel blue financing</i> 			
100%			
3	Kebijakan Pengelolaan <i>Blue Carbon</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kerangka kerja <i>Indonesia Blue Carbon Strategy Framework (IBCSF)</i> • Kerjasama lintas sektoral melalui <i>multi-agency meeting</i> guna menunjang perencanaan pembangunan yang holistik dalam pengarusutamaan isu <i>blue carbon</i> 	100%
4	Kebijakan Pengelolaan WPP	Publikasi pengelolaan perikanan udang berkelanjutan di WPP 718 melalui pengaturan jumlah armada optimal, <i>resource rent tax</i> /penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta instrumen pengendalian pengelolaan perikanan	100%

Persentase kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L

Jumlah rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan yang dijalankan oleh K/L

Jumlah total rekomendasi inovasi pembangunan yang dihasilkan Bappenas untuk dijalankan K/L

X 100%

Persentase kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L

100% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan yang dijalankan oleh K/L

100% total rekomendasi inovasi pembangunan yang dihasilkan Bappenas untuk dijalankan K/L

X 100% = 100%

Sesuai dengan realisasi kinerja tersebut, maka capaian fokus program yang dilaksanakan oleh ICCTF Tahun 2021 serta pencapaian lainnya, sebagai berikut:

CAPAIAN PROGRAM

Pada Tahun 2021 ICCTF sudah sepenuhnya melakukan implementasi proyek hibah COREMAP-CTI WB dan COREMAP-CTI ADB. Guna memperkenalkan kegiatan yang dilakukan ICCTF kepada pemangku kepentingan serta khalayak luas, ICCTF secara gencar melakukan kegiatan komunikasi dan *outreach* melalui multimedia. Kegiatan komunikasi meliputi produksi media, pengelolaan sosial media dan website, serta media monitoring. ICCTF juga melakukan penajaman terhadap SOP kerja dan sistem komunikasi internal untuk meningkatkan kinerja Satker.

A COREMAP-CTI

1 COREMAP-CTI Dana Hibah *World Bank*

COREMAP-CTI dengan dana hibah WB memiliki empat (4) komponen kegiatan, dimana tiga (3) komponen dilaksanakan oleh LIPI (komponen I, II, dan IV) dan satu (1) komponen dilaksanakan oleh ICCTF Bappenas (komponen III). Komponen III adalah peningkatan efektifitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas yang dilakukan di dua lokasi yaitu Papua Barat (SAP Raja Ampat, SAP Kep. Waigeo sebelah barat, dan KKPD Raja Ampat) dan Nusa Tenggara Timur dengan fokus area di Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Tujuannya adalah meningkatkan nilai efektivitas pengelolaan ekosistem target menuju Kawasan Konservasi Perairan yang terkelola secara optimal yaitu setidaknya 75% level biru.

Komponen III terdiri dari tiga (3) sub komponen dan enam (6) paket kegiatan yang dilakukan dengan mekanisme pemberian hibah bantuan pemerintah melalui *call for proposal* dan akhirnya terpilih lima mitra pelaksana untuk implementasi kegiatan. Kontrak kerja sama ditandatangani pada 29 Juli 2020 dan berlaku sampai dengan 28 Februari 2022 (19 bulan pelaksanaan kegiatan). Keenam paket kegiatan tersebut, yaitu:



PAKET KEGIATAN 1:

Pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan oleh masyarakat di Raja Ampat. Mitra pelaksana paket ini adalah **Yayasan Terangi**

\$ USD 1,245,300

📍 Raja Ampat



PAKET KEGIATAN 2:

Pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan oleh masyarakat di TNP Laut Sawu. Mitra pelaksana paket ini adalah **YAPEKA**

\$ USD 751,600

📍 TNP Laut Sawu



PAKET KEGIATAN 3:

Implementasi RAN/NPOA Jenis terancam. Mitra pelaksana paket ini adalah **Yayasan Reef Check Indonesia**

\$ USD 967,000

📍 TNP Laut Sawu dan Raja Ampat



PAKET KEGIATAN 4:

Implementasi terhadap wilayah pengelolaan pesisir terpadu. Mitra pelaksana paket ini adalah **PKSPL-IPB**

\$ USD 869,000

📍 Papua Barat



PAKET KEGIATAN 5:

Dukungan untuk kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas). Mitra pelaksana paket ini adalah **Yayasan Terangi**

\$ USD 1,344,300

📍 TNP Laut Sawu dan Raja Ampat



PAKET KEGIATAN 6:

Akses wilayah pengelolaan sumber daya perikanan untuk masyarakat. Mitra pelaksana paket ini adalah **PILI**

\$ USD 598,000

📍 TNP Laut Sawu dan Raja Ampat

PDO Level Indikator

Target indikator untuk *Project Development Objective* (PDO) adalah dua (2) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) minimal mencapai efektifitas pengelolaan 75% level biru atau skor EVIKA 44,96% pada Tahun 2021 dan empat (4) KKP mencapai efektifitas pengelolaan 75% level biru atau skor EVIKA 44,96% pada Tahun 2022. Status dari keempat KKP saat ini dapat dilihat pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3 | Status EVIKA pada 4 Kawasan Konservasi Perairan sampai dengan akhir Tahun 2021

MPA	EVIKA 2020/2021	PENGELOLAAN
TNP Laut Sawu	54,46	Optimum
SAP Waigeo Sebelah Barat	61,11	Optimum
SAP Raja Ampat	66,26	Optimum
KKPD Raja Ampat	83,78	Optimum

Intermediate Result Indicator

A. Infrastruktur Skala Kecil terbangun di KKP

Delapan (8) infrastruktur ekowisata kecil ditargetkan dibangun di KKP dan sesuai dengan rencana pengelolaan KKL pada Tahun 2021. Berikut adalah capaian untuk pembangunan infrastruktur saat ini:

i. Enam (6) infrastruktur penunjang ekowisata telah dibangun

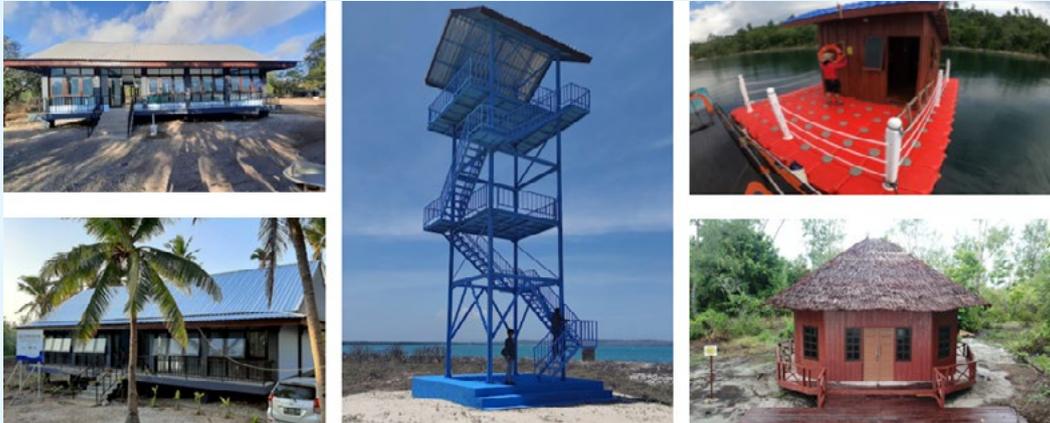
- Menara pantau Manta di Yef Nabi Kecil (SAP Raja Ampat) – Q2
- Menara pantau Manta di Dayan (KKPD Selat Dampier) – Q2
- Pusat Informasi Ekowisata di Miosara Kecil (SAP Raja Ampat) – Q2
- Pusat Informasi Ekowisata di Mebba, Sabu Raijua (TNP Laut Sawu) – Q1
- Pusat Informasi Ekowisata di Oesina, Kupang (TNP Laut Sawu) – Q3
- Menara pantau Cetacean di Naikean, Kupang (TNP Laut Sawu) – Q3

ii. Tiga (3) infrastruktur dalam proses finalisasi DED dan perizinan lingkungan

- Hiking track ke Danau ubur-ubur. 90% DED dalam proses revisi
- Pusat Informasi Ekowisata. 90% DED dalam proses revisi
- Jetty Apung. 90% DED dalam proses revisi

iii. Tiga (3) infrastruktur lain yang dikembangkan

- Solar panel di Nusa Manuk (TNP Laut Sawu) – Q1
- Jaring apung di Arefi Selatan (SKKPD Selat Dampier) – Q2
- Jaring Apung di Yensawai Timur (KKPD Selat Dampier) – Q2



Gambar 3.1 | Aset infrastruktur yang telah dibangun

B. Penguatan Pokmaswas dalam Melakukan Pengawasan Berkala di KKP

Pada Tahun 2021, 14 (empat belas) kelompok Pokmaswas ditargetkan telah terdaftar dan melakukan pengawasan rutin di wilayah sasaran (Kelompok harus didaftarkan oleh dinas/dinas kelautan provinsi). Berikut adalah capaian saat ini:

- 23 Pokmaswas telah terdaftar di Provinsi (14 di NTT dan 9 di Papua Barat)
- 20 Pokmaswas telah mengadakan patrol rutin sejak Juni 2021
- 18 Pokmaswas sudah mendapatkan pelatihan pengawasan level 1 dan 20 Pokmaswas mendapatkan pelatihan level 2 serta 20 Pokmaswas mendapatkan pelatihan level 3.
- 18 perlengkapan sudah didistribusikan kepada seluruh Pokmaswas
- 6 menara pengawas sudah terbangun (2 di Raja Ampat dan 4 di Laut Sawu).
- 21 rencana kerja dan peta area pengawasan sudah disusun
- 9 perahu pengawas sudah selesai dibuat (100%) dan 3 unit sudah melakukan *sea trial* di bulan Desember

C. Implementasi rencana aksi RZWP3K Papua Barat di KKP target

Pada Tahun 2021, 13 (tiga belas) kegiatan yang tercantum dalam rencana aksi RZWP3K ditargetkan telah terlaksana. Berikut adalah capaian saat ini:

- Fasilitasi pengakuan MHA yang ada dan terkait dengan pesisir dan laut di Papua Barat
- Pengembangan regulasi pemanfaatan sumber daya alam di lokasi MHA
- Meningkatkan data Tarik dan destinasi wisata
- Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas ekowisata

- Pelatihan selam untuk pemandu wisata di dive spot
- Menerapkan teknologi rantai dingin pasca panen untuk meningkatkan kualitas produk perikanan
- Penelitian dan Pengembangan
- Rehabilitasi ekosistem mangrove
- Pengembangan regulasi dan SOP Pengelolaan Kawasan Konservasi
- Pengembangan infrastruktur dan fasilitas di MPA
- Rehabilitasi habitat dan populasi ikan
- Pengawasan dan pengendalian marine protected area
- Meningkatkan kapasitas staf badan pengelola MPA
- Sosialisasi, penyadaran dan edukasi Kawasan konservasi laut

D. Implementasi RAN Hiu, Pari Manta dan Cetacea

Pada Tahun 2021 ini ditargetkan 6 (enam) kegiatan yang tercantum dalam NPOA cetacea, hiu, dan pari manta telah terlaksana. Ada pun capaian saat ini 16 (enam belas) kegiatan telah terlaksana. Berikut adalah rincian kegiatan yang dilakukan:

- Melakukan survey dan monitoring sebaran penampakan, ancaman, jalur migrasi dan sebaran habitat cetacea
- Melakukan capacity building untuk peneliti
- Mengadakan perhitungan/assessment pada habitat penting termasuk pada koridor cetacea
- Melakukan pemetaan pada habitat penting termasuk koridor migrasi cetacea
- Melakukan pelatihan teknis untuk implementasi dari ekowisara cetacea
- Melakukan pelatihan teknis terkait metode penanganan mamalia laut terdampar
- Pengembangan database nasional hiu dan pari
- Melakukan pencatatan pendaratan tangkapan untuk perikanan hiu dan pari yang mencakup genus/spesies di lokasi pendaratan utama
- Kajian alat tangkap berkelanjutan/alat tangkap ramah lingkungan
- Persiapan publikasi dan materi sosialisasi
- Sosialisasi
- Survei dasar dan pemantauan status populasi pari manta di empat lokasi
- Manta tagging di empat lokasi
- Menyiapkan dan menyebarkan materi sosialisasi
- Mengembangkan penilaian model wisata manta berbasis masyarakat
- Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pada ekowisata manta



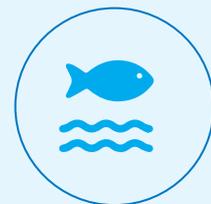
Pada Tahun ini ICCTF sudah mulai mengimplementasikan seluruh kegiatan COREMAP-CTI ADB yang dilaksanakan oleh Konsultan Perusahaan dan LSM. Kegiatan yang sudah dilaksanakan berada di 3 (tiga) lokasi di KKPD Nusa Penida, Provinsi Bali; TPK Gili Balu, dan TWP Gili Matra, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada Tahun 2021, COREMAP-CTI ADB telah melaporkan perkembangan capaian output yang mencakup:



Penguatan institusi dan pengelolaan terumbu karang



Pengembangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya berbasis ekosistem



Peningkatan kapasitas terkait usaha sumber daya kelautan

Implementasi kegiatan proyek COREMAP-CTI ADB didukung melalui delapan (8) paket kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Kawasan Nusa Penida: Paket Kegiatan 1 dan 4
- Kawasan Gili Matra: Paket Kegiatan 2 dan 5
- Kawasan Gili Balu: Paket Kegiatan 3 dan 6
- Asesmen Biofisik seluruh Kawasan: Paket Kegiatan 7
- Program Pasca Sarjana

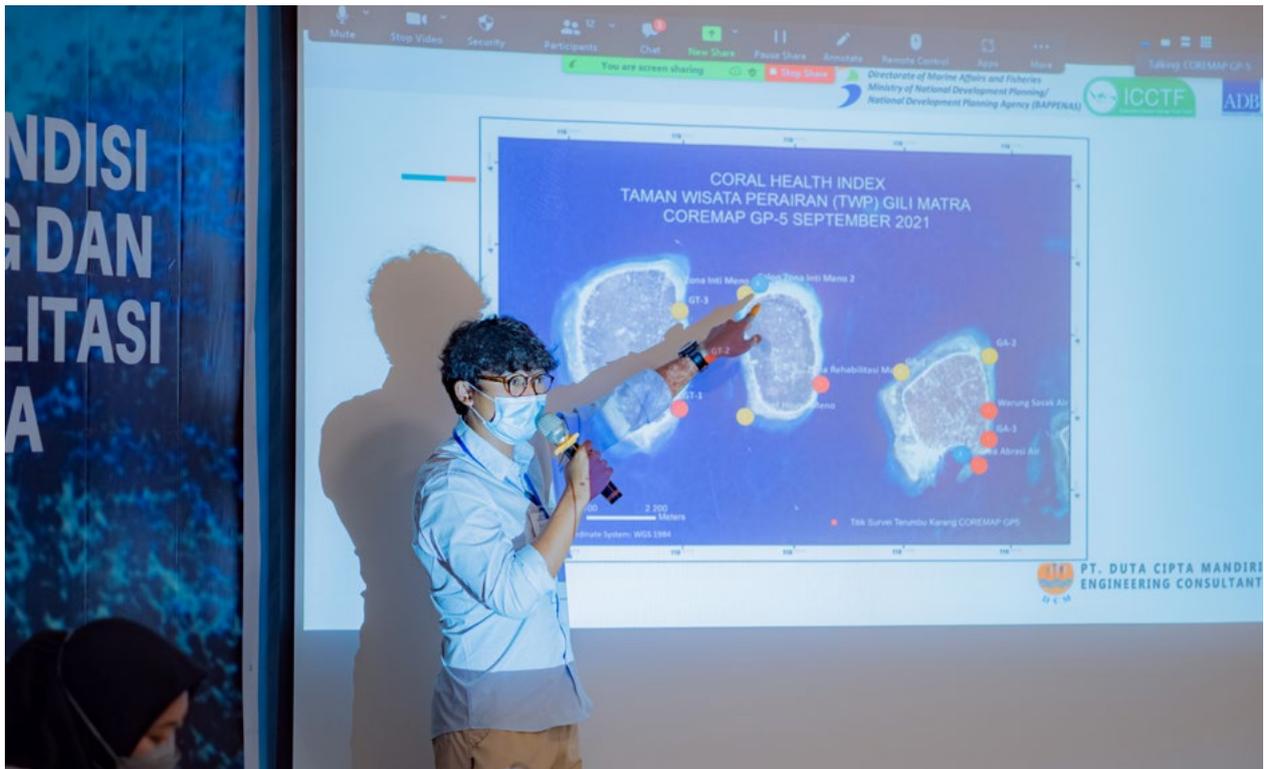


Penguatan institusi dan pengelolaan terumbu karang



Terkait dengan penguatan institusi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang, terdapat capaian-capaian aktivitas yang berkontribusi terhadap pencapaian output ini. Pertama, aktivitas untuk peningkatan kapasitas yang mendukung output tersebut yaitu tiga puluh empat (34) staf pemerintah dan asosiasi mengikuti peningkatan kapasitas terkait dengan rantai pasok *Tuna longline*. Kegiatan tersebut mencakup pengetahuan terakit regulasi perikanan sumber daya laut berkelanjutan, pemasaran Tuna dan pemangku kepentingan pendukung pemasaran Tuna.

Selain peningkatan kapasitas, tersusunnya SOP pengelolaan Kawasan konservasi juga merupakan cakupan dari output terkait penguatan institusi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang. Pada 2021, mitra pelaksana COREMAP CTI-ADB telah menyusun draft SOP terkait dengan pengelolaan ekowisata, rehabilitasi, restorasi dan pengelolaan institusi. SOP tersebut akan diterapkan di Kawasan konservasi Gili Matra, Gili Balu dan Nusa Penida. Proses diskusi, konsultasi public dan FGD bersama dengan pemangku kepentingan telah dilakukan untuk mengidentifikasi SOP prioritas dan substansi SOP. Pada Tahun 2022, diharapkan dokumen SOP untuk ketiga Kawasan konservasi dapat disetujui dan diterapkan.



Penguatan institusi juga dilakukan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pengelolaan ekosistem melalui program pasca sarjana bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor sebagai mitra pelaksana. Dalam program ini, sebanyak empat kandidat telah dinyatakan lolos seleksi untuk mengikuti program pasca sarjana di *University of Queensland*. IPB, sebagai mitra pelaksana berperan dalam persiapan perkuliahan, mekanisme monitoring pembelajaran dan pengelolaan riset. Terkait dengan riset, IPB memiliki peran penting sebagai asisten supervisor yang berkomunikasi intensif dengan *University of Queensland* untuk pelaksanaan riset yang berkualitas.

Dalam hal infrastruktur, COREMAP-CTI ADB juga memberikan dukungan terhadap pembangunan pusat informasi turis di Kawasan konservasi Gili

Matra, Gili Balu dan Nusa Penida. Pada kuartal 4 2021, mitra pelaksana telah menerima revisi atas desain dan DED yang diajukan pada kuartal 2 2021. Pusat informasi turis ini akan menunjang penyediaan informasi yang komprehensif terkait dengan tujuan wisata, pengelolaan ekowisata dan peningkatan pengetahuan terkait kelestarian ekosistem.

Selain pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas, penelusuran dan kajian terkait dengan pembayaran jasa lingkungan atau *Payment for Ecosystem Services*. Diskusi dan kajian yang dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan telah menghasilkan konsep terkait mekanisme pembayaran jasa lingkungan. Konsep ini ditujukan untuk meningkatkan kepedulian dan kontribusi masyarakat untuk mendukung kelestarian ekosistem di Kawasan konservasi.



Pengembangan rencana **pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem**



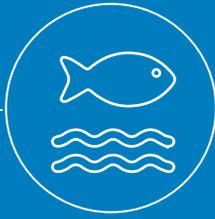
Terdapat dua fokus utama terkait dengan pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem yaitu konservasi mangrove dan terumbu karang dan pengembangan rencana aksi terkait dengan spesies yang dilindungi yaitu mola-mola, penyu dan hiu. Saat ini, mitra pelaksana untuk Kawasan Gili Balu, Gili Matra dan Nusa Penida telah mengidentifikasi metode dan pendekatan survey terkait dengan keberadaan mola-mola

dan dinamika hiu dan penyu. Identifikasi yang dihasilkan telah dapat memberikan informasi awal terkait dengan keberadaan satwa dilindungi berdasarkan zona yang ditentukan dalam proses pemetaan. Pada kuartal 1 2022, diharapkan laporan terkait dengan dinamika mola-mola, hiu dan penyu dapat diserahkan bersamaan dengan kajian terkait dengan daya dukung ekosistem dari satwa tersebut.

Terkait dengan rehabilitasi mangrove, mitra pelaksana di Gili Balu dan Nusa Penida telah mengidentifikasi luasan area rehabilitasi Mangrove. Pada kuartal 3 2021, mitra pelaksana di Gili Balu bahkan telah melakukan penanaman 10.500 mangrove. Untuk kawasan Gili Matra, mitra pelaksana pada kuartal 4 2021 ditargetkan untuk menyampaikan laporan terkait identifikasi area rehabilitasi mangrove dan terumbu karang.

Terkait dengan infrastruktur, COREMAP-CTI ADB, melalui mitra pelaksana telah Menyusun desain dan DED untuk pembangunan menara pengawas. Infrastruktur ini dapat mendukung optimalisasi peran masyarakat pengawas dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi. Pada 2021, desain yang telah diserahkan untuk dilakukan peninjauan adalah, *mangrove tracking* dan menara pemantauan burung di Nusa Penida dan menara pengawas di Gili Matra dan Gili Balu.





Peningkatan kapasitas terkait usaha sumber daya kelautan



Terkait dengan usaha sumber daya kelautan, proyek COREMAP-CTI ADB memberikan dukungan terhadap budidaya dan pemasaran komoditas rumput laut, Tuna dan Kakap Merah. Untuk mendukung capaian terkait dengan usaha sumber daya kelautan, pada 2021, mitra pelaksana di Kawasan konservasi Nusa Penida telah melakukan *baseline* budidaya rumput laut yang juga mencakup produk olahan unggulan, kemasan dan pemasaran. Untuk Kawasan Gili Matra, mitra pelaksana telah melakukan pendekatan dan diskusi bersama dengan nelayan dan kelompok perempuan untuk pengelolaan dan budi daya rumput

laut. Sedangkan di Gili Balu, mitra pelaksana telah mengidentifikasi potensi usaha sumber daya kelautan dan telah mengajukan aktivitas untuk identifikasi pengelolaan pasca panen, peningkatan kapasitas terkait penangkapan ikan bertanggung jawab dan pengelolaan bisnis.

Untuk mendukung pemasaran dan usaha sumber daya kelautan, COREMAP-CTI ADB telah memulai implementasi paket kegiatan 7 yang memiliki cakupan kegiatan yaitu:



Kajian untuk mendukung pengelolaan dan budidaya rumput laut, Tuna dan Kakap Merah



Memberikan dukungan kepada Badan Pengelola Kawasan Konservasi Perairan melalui penyediaan hasil kajian aktual terkait dengan lingkungan dan ekosistem

Melalui cakupan kegiatan di atas, Paket Kegiatan ini diharapkan dapat menunjang peningkatan pasar domestik dan internasional sumber daya laut Indonesia, mempromosikan industri perikanan yang bertanggung jawab, mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan melalui hasil asesmen *biophysic* dan memastikan praktik yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan sub-regional (WPP 713 dan 573) serta peraturan internasional.

C. Blended Finance

Kegiatan window *Blended Finance* yang dilakukan pada Tahun 2021 adalah melanjutkan upaya-upaya untuk mengakselerasi *Sustainable Blue Financing Institution* (SBFI) dalam pengembangan blue bond. Salah satu prosesnya adalah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ICCTF dan BLU LPMUKP.

Sejak Tahun lalu, ICCTF dan BLU-LPMUKP telah sepakat bekerjasama dalam *sustainable blue financing*. Untuk itu disusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat dan mengatur rincian teknis pekerjaan, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, hak dan kewajiban, dan hal-hal lain yang akan disepakati bersama. Pada bulan Mei 2021, dilakukan pembahasan rencana strategis pengelolaan kawasan konservasi dan lokasi prioritasnya sebagai acuan dalam penyusunan ruang lingkup SPK antara ICCTF dan BLU-

LPMUKP. Program di ICCTF yang saat ini sedang berjalan adalah program peningkatan efektivitas pengelolaan terumbu karang (COREMAP-CTI) dimana kegiatannya berfokus pada peningkatan pengelolaan kawasan konservasi, perbaikan ekosistem pesisir dan peningkatan kapasitas masyarakat sehingga ekosistem pesisir lestari dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Sebagai hasil diskusi disepakati bahwa lokasi program *Blue Financing* akan difokuskan pada WPP 714, 715, 718, NTT dan Papua Barat.

Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 5 Tahun ke depan sejak 16 Desember 2020 saat ini telah ditandatangani. Bappenas dan KKP nantinya masing-masing menunjuk Pimpinan Tinggi Madya untuk menandatangani PKS.

Problue

1. Policy Note

Salah satu capaian di bawah kerangka kerja Problue adalah penyusunan *Policy Paper* yang memuat strategi pendanaan inovatif bagi kegiatan di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi pengembangan perikanan berkelanjutan, pengelolaan kawasan konservasi laut dan implementasi karbon biru.

Policy Paper ini disusun dengan judul "*Blue Finance Policy Note: Financing options for small-medium fisheries enterprise and marine conservation in Indonesia*". *Policy Paper* tersebut memuat beberapa bagian, pertama adalah penjelasan mengenai pentingnya *blue economy* dan kebutuhan *blue financing* di Indonesia sebagai negara maritim, Bagian kedua akan memuat berbagai perspektif, hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam *blue financing*. Berikutnya bagian ketiga akan menjelaskan

tentang perkembangan *blue financing* di Indonesia yang telah dilaksanakan oleh berbagai inisiatif dan lembaga baik pemerintah, swasta, NGO/CSO, perbankan dan mitra pembangunan. Untuk bagian keempat menjelaskan faktor kunci dalam pendanaan yang dilihat dari studi kasus pada pengusaha perikanan skala kecil menengah dan konservasi laut. Bagian kelima berupa rekomendasi strategi pendanaan bagi pengusaha perikanan skala kecil menengah dan bagian keenam berupa rekomendasi strategi pendanaan bagi pengelolaan konservasi laut. Selanjutnya bagian terakhir adalah usulan *Roadmap* bagi pengembangan *blue financing* dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang.

Konsep *Policy Paper Blue Financing* yang disusun oleh Tim konsultan WB dan ICCTF telah disampaikan kepada *Task Tim Leader Blue Program* di World Bank pada akhir Maret 2021 untuk mendapatkan tanggapan dan masukan.

Selain itu, sebagai rangkaian dari program kerja Problue, telah disusun usulan rencana pilot project *Blue Financing* di Gorontalo, NTT dan NTB untuk akses pendanaan hibah LAUTRA. Namun sayangnya pada Mei 2021 diketahui bahwa potensi pendanaan dari LAUTRA untuk Tahun ini belum dapat terlaksana sehingga perlu dicari alternatif pendanaan lainnya. Tindak lanjutnya adalah review *Policy Note Blue Financing* oleh World Bank dan rangkaian diskusi bersama BPD LH, OJK, dan lainnya akan tetap dikawal untuk menjajaki potensi Kerjasama.

2. *Advisory Panel*

Output selanjutnya adalah penyusunan Surat Keputusan (SK) pembentukan *Advisory Panel Blue Financing*. Pada akhir Mei 2021 telah disusun konsep SK dari Sekretaris Menteri PPN/ Sestama Bappenas tentang pembentukan Komite Pengarah dan Tim Teknis Kelompok Kerja Program Kolaborasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor

Kelautan dan Perikanan Melalui Dukungan *Sustainable Blue Financing* di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Advisory Panel Blue Financing terdiri atas Komite Pengarah dan Tim Teknis dari berbagai K/L terkait, perwakilan mitra pembangunan, perwakilan pemerintah daerah, pihak swasta, akademisi dan kelompok masyarakat. Komite Pengarah akan terdiri atas para pejabat Eselon I di K/L terkait dan perwakilan mitra pembangunan selaku donor. Komite Pengarah ini rencananya akan diketuai oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas dan Sekretaris Jenderal KKP. Sedangkan Tim Teknis terdiri atas para pejabat Eselon II dan perwakilan dari berbagai pihak yang terkait secara teknis dan substansial. Tim Teknis akan diketuai oleh Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas. Penentuan anggota Komite Pengarah dan Tim Teknis ini selanjutnya dilakukan legal review oleh Biro Hukum Bappenas

D. *Blue Carbon*

Kegiatan dalam window *Blue Carbon* pada periode ini adalah kerjasama Kementerian PPN/ Bappenas dan ICCTF dengan *Department of Industry, Science, Energy and Resources* (DISER), Pemerintah Australia dalam Side Event COP 26 di Glasgow. Pada tanggal 6 November 2021, dilaksanakan Side Event bertempat di Paviliun Australia dengan judul “How Can Blue Carbon Policies be Designed to Drive Sustainable and Effective Change”. Pada sambutannya, Angus Taylor, Menteri Energi dan Pengurangan Emisi Pemerintah Australia menyampaikan bahwa Pemerintah Australia tengah mengimplementasikan dua program blue carbon bersama Indonesia, Fiji dan Papua Nugini. Kedua

program tersebut adalah penyiapan dokumen tentang implementasi IPCC Wetlands Supplement dan rencana kursus pelatihan kebijakan karbon biru untuk negara di kawasan Pasifik.

Pemerintah Indonesia melalui Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, menyambut baik kerja sama di kawasan Pasifik ini. Beliau juga menekankan bahwa komitmen Indonesia dalam mendukung pengurangan emisi karbon ditunjukkan melalui penyerahan dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC), termasuk pembahasan *blue carbon*. ICCTF dan DISER selanjutnya akan terus berkoordinasi untuk mengawal kerjasama tersebut pada Tahun 2022.

E. Bioekonomi

Setelah pembahasan hasil penelitian, finalisasi hasil kajian dalam bentuk laporan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan dengan para ahli yang dilakukan sejak Tahun lalu, pada Tahun 2021 ini kegiatan Bioekonomi difokuskan pada Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Studi Bioekonomi. Seminar dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2021 bertempat di Hotel Fairmont, Jakarta. Seminar ini bertujuan untuk: (i) Mendapatkan masukan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Bappenas terkait dengan perencanaan pembangunan, untuk mendukung pemasukan PNBP sektor perikanan secara berkelanjutan; dan (ii) Penyampaian hasil kajian Bioekonomi Perikanan Udang di Laut Arafura (WPP 718) yang telah dilakukan pada Tahun sebelumnya. Kegiatan dihadiri oleh Perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, Perwakilan Akademisi, Perwakilan NGO, Perwakilan Komnas Kajian, Perwakilan IMFISERN, dan Perwakilan Praktisi/Pakar.

E. Project Pipeline

Pada periode 2021, ICCTF juga melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kemitraan dan kolaborasi berkaitan usaha peningkatan pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan sebagai kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Kolaborasi dan kemitraan yang dibangun menghasilkan komitmen terkait dengan dukungan pendanaan, yaitu dengan ADB. Kementerian PPN/Bappenas, ICCTF, dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan ADB pada tahun 2021 ini mengajukan usulan proyek *Towards Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME)* dengan salah satu fokus kegiatan pada penyusunan grand strategi budidaya udang di Indonesia. Dari *project* ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dari produk perikanan budidaya di pasar global.

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja 2020 – 2021

Realisasi pencapaian kinerja Direktorat Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 yang disandingkan dengan capaian Tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4 | Persandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2021 ICCTF dan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IV	Sasaran Strategis/Program 3:				
	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan yang Visioner				
1	Indikator SS 3.2				
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam				
1	Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Deputi	80-84,9%	100%	100%

3.1.3 Capaian Kinerja Lainnya

Selain pencapaian dalam program, ICCTF juga memiliki pencapaian dalam bidang komunikasi. Selama Tahun 2021, ICCTF telah melakukan Publikasi Media sebanyak **70 Publikasi Pemberitaan** melalui berbagai media masa baik secara *online* maupun cetak. ICCTF juga melakukan publikasi melalui media audio **Podcast** dengan judul “**Cerita Dari Laut**” dimana sampai saat ini telah terposting sampai dengan **8 Episode**. Kemudian untuk Website ICCTF, diketahui telah dikunjungi oleh sebanyak **102.631 akun** dengan jumlah kunjungan sebanyak **403.717 visit** selama satu Tahun.



Gambar 3.2 | Jumlah pengikut sosial media ICCTF sampai dengan akhir Tahun 2021

ICCTF juga melakukan komunikasi digital melalui sosial media. Bentuk komunikasi ini memiliki kelebihan karena dapat lebih interaktif dan real time. Media sosial yang dikelola oleh ICCTF terdiri atas: Facebook (Indonesia Climate Change Trust Fund); Twitter (@ICCTF_ID); Instagram (@icctfofficial); dan Youtube (ICCTF Official).

3.2 Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2021

3.2.1 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021

Total penyerapan di Tahun 2021 ini adalah 99,39%. Pada 2021, anggaran ICCTF sempat mengalami *refocusing* untuk mendukung pendanaan penanganan Pandemi COVID-19. Dari alokasi Rp 12 Miliar kemudian menjadi Rp 6,3 Miliar. Pemotongan ini dilaksanakan hanya pada alokasi anggaran Rupiah Murni. Rincian penyerapan untuk Satker MWA ICCTF Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5 | Realisasi Anggaran ICCTF Tahun 2021

Output	Kegiatan	Alokasi Anggaran 2021	Dipa Revisi (Refocusing)	Realisasi Anggaran 2021		Sisa Dana
RM	Rupiah Murni	12.000.000.000	6.392.015.000	6.340.320.759	99,19%	51.694.241
Sub Komponen 301-A	Pendampingan Kegiatan Proyek Hibah	4.293.170.000	1.425.986.000	1.410.222.743	98,89%	15.763.257
Sub Komponen 301-B	Penggalangan Dana (Fundraising) & Komunikasi	1.418.980.000	896.105.000	892.783.722	99,63%	3.321.278
Sub Komponen 301-C	Pelaksanaan Dukungan Kegiatan Operasional ICCTF	6.287.850.000	4.069.924.000	4.037.314.294	99,20%	32.609.706
HLN	Hibah Luar Negeri	44.820.000.000	70.187.789.000	69.771.410.048	99,41%	416.378.952
Sub Komponen 301-D	Hibah COREMAP-CTI WB	25.650.000.000	51.017.789.000	50.732.256.635	99,44%	285.532.365
Sub Komponen 301-E	Hibah COREMAP-CTI ADB	19.170.000.000	19.170.000.000	19.039.153.413	99,32%	130.846.587
TOTAL		56.820.000.000	76.579.804.000	76.111.730.807	99,39%	468.073.193

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021, implementasi anggaran untuk kegiatan program COREMAP-CTI WB dan ADB sudah dapat terlaksana dengan baik dan sudah beradaptasi dengan segala keterbatasan kegiatan di masa pandemi COVID-19. Penyerapan dana WB dari alokasi Rp 51 miliar adalah 99,44% dan penyerapan dana ADB dari alokasi Rp 19,1 miliar adalah 99,32%. Sedangkan untuk dana Rupiah Murni dari alokasi Rp 6,3 miliar adalah 99,19%. Kemudian pada Satker Bappenas, alokasi dana ICCTF Tahun Anggaran 2021 ini adalah sebesar Rp 4,2 miliar yang terdiri dari 4 sub komponen. Total penyerapan di akhir Tahun 2021 ini adalah sebesar 99%. Rincian dapat dilihat pada **Tabel 3.6**.

Tabel 3.6 | Realisasi Anggaran ICCTF di Satker Bappenas Tahun 2021

Sub Komponen	Kegiatan	Alokasi Anggaran 2021	Total Penyerapan s/d Desember 2021		Sisa Anggaran
Sub Komponen-D	ICCTF	2.800.912.000	2.800.910.640	100%	1.360
Sub Komponen-E	Layanan Perkantoran ICCTF	655.100.000	613.821.440	93%	41.278.560
Sub Komponen-T	PPK PPN XIV (ICCTF)	685.000.000	684.680.725	99%	319.275
Lintas Bidang	ICCTF	100.000.000	99.987.508	99%	12.492
TOTAL		4.241.012.000	4.199.400.313	99%	41.611.687

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas, Laporan Keuangan ICCTF setiap Tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada Tahun 2021 ini telah dilakukan audit khusus untuk Hibah COREMAP-CTI WB TA 2020 dan COREMAP-CTI ADB TA 2020 dan BPK telah mengeluarkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** untuk kedua Laporan Keuangan tersebut dan hasil tersebut juga telah disampaikan kepada kedua Donor yaitu *World Bank* dan *Asian Development Bank* serta telah mendapatkan persetujuan (*accepted*) dari Donor.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2021

Pada Tahun 2021 ini realisasi anggaran ICCTF jauh lebih tinggi dari Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020 penyerapan ICCTF sebesar 80%, sedangkan pada Tahun 2021 ini penyerapan ICCTF sebesar 99,39%. Rincian perbandingannya dapat dilihat pada **Tabel 3.7**.

Tabel 3.7 | Perbandingan Realisasi Anggaran ICCTF Tahun 2020-2021

Kegiatan	Realisasi Anggaran 2020		Realisasi Anggaran 2021	
	Realisasi	Persentase	Realisasi	Persentase
Rupiah Murni	5.940.000.000	100%	6.340.320.759	99,19%
Pendampingan Kegiatan Proyek Hibah	1.330.974.000	100%	1.410.222.743	98,89%
Penggalangan Dana (Fundraising) & Komunikasi	462.780.000	100%	892.783.722	99,63%
Pelaksanaan Dukungan Kegiatan Operasional ICCTF	4.146.246.000	100%	4.037.314.294	99,20%
Hibah Luar Negeri	29.299.875.000	76%	69.771.410.048	99,41%
Hibah COREMAP-CTI WB	21.015.866.728	100%	50.732.256.635	99,44%
Hibah COREMAP-CTI ADB	1.132.908.090	14%	19.039.153.413	99,32%
TOTAL	28.082.260.047	80%	76.111.730.807	99,39%

3.2.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran yang tidak tercapai maksimal terutama akibat dari situasi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan serta tidak dapat terlaksananya beberapa kegiatan di lapangan dan melibatkan khalayak ramai. Untuk menanggapi permasalahan ini, ICCTF telah melaksanakan revisi rencana kerja dan anggaran beserta penyesuaian waktu pelaksanaannya. Selain itu, ICCTF senantiasa melaksanakan penerapan kegiatan berdasarkan protokol COVID-19 yang ketat baik untuk pelaksanaan kegiatan operasional sekretariat maupun pelaksanaan proyek di lapangan. Walaupun demikian, penyerapan anggaran tetap akan dioptimalkan hingga akhir Tahun Anggaran guna memberikan dukungan bagi pelaksanaan kegiatan.

3.3 Evaluasi Internal

Dalam periode pelaksanaan kegiatan Tahun 2021, ICCTF mengidentifikasi tantangan utama yang berpengaruh terhadap pencapaian target kegiatan antara lain:

- Penundaan kegiatan sebagai bagian dari pencegahan penularan COVID-19. Pada kuartal pertama 2021, kegiatan proyek yang dikelola oleh ICCTF khususnya COREMAP-CTI yang didanai oleh WB dan ADB belum dapat dilakukan secara penuh karena masih diterapkannya PPKM level 3 di wilayah proyek. Dengan adanya situasi ini, kegiatan-kegiatan pertemuan yang melibatkan masyarakat seperti pelatihan, FGD dan konsultasi publik tidak bisa dilakukan. Hal ini berpengaruh terhadap jadwal target pencapaian kegiatan.
- Perubahan penetapan lokasi pembangunan infrastruktur juga menjadi hambatan dalam pencapaian *output* kegiatan terkait dengan pembangunan infrastruktur pendukung ekowisata dan pengawasan kawasan konservasi. Perubahan lokasi pembangunan infrastruktur didasarkan pada pertimbangan penataan ruang di lokasi yang diusulkan dan efektivitas pengelolaan infrastruktur.

Terkait dengan hambatan utama di atas, ICCTF didukung oleh Bappenas dalam upaya menyusun rencana mitigasi dan *monitoring* intensif dalam rangka percepatan pencapaian. Upaya tersebut antara lain konsolidasi bersama dengan *Program Implementation Unit* dan mitra pelaksana kegiatan untuk mengidentifikasi rencana aksi prioritas yang akan berdampak signifikan terhadap pencapaian proyek. Upaya yang dilakukan ini memberikan hasil positif terhadap pencapaian *output* kegiatan dan penyerapan anggaran khususnya untuk COREMAP-CTI baik yang didanai oleh WB maupun ADB.

Sedangkan terkait dengan koordinasi yang melibatkan instansi baik tingkat pusat maupun daerah, terus dilakukan komunikasi melibatkan pimpinan instansi untuk dapat menghasilkan kesepakatan dan solusi untuk pencapaian *output* kegiatan. *Monitoring* intensif juga dilakukan melalui pertemuan antara ICCTF dan Bappenas untuk mengidentifikasi perkembangan kegiatan dan disandingkan dengan *monitoring* penyerapan anggaran.



4.1 Kesimpulan

Satker ICCTF melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan, telah mendukung perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel dengan tersusunnya rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan terhadap dampak perubahan iklim di tiap-tiap sektor. Pada Tahun 2021 ini juga ICCTF tengah mengimplementasikan 12 program (*on going*) untuk window *marine-based* yang tersebar di 7 lokasi di Indonesia, sehingga secara total sejak Tahun 2010 ICCTF telah mengimplementasikan 88 program yang tersebar di 114 lokasi di Indonesia.

Jumlah dana yang dikelola Pokja III ICCTF pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 6.592.015.000 dari dana Rupiah Murni APBN, Rp 25.650.000.000 dari dana Hibah WB, dan Rp 19.170.000.000 dari dana Hibah ADB. Dibandingkan Tahun sebelumnya, pada Tahun 2021 ini capaian realisasi anggaran ICCTF jauh lebih tinggi yaitu sebesar 99,39%. Hambatan utama yang dihadapi pada Tahun ini masih sama dengan Tahun sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19 yang berdampak pada mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan serta tidak dapat terlaksananya beberapa kegiatan di lapangan dan melibatkan khalayak ramai. Namun ICCTF senantiasa melaksanakan penerapan kegiatan berdasarkan protokol COVID-19 yang ketat baik untuk pelaksanaan kegiatan operasional sekretariat maupun pelaksanaan proyek di lapangan.

4.2 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas rekomendasi yang inovatif untuk mendukung perencanaan pembangunan terhadap dampak perubahan iklim adalah meningkatkan kebaruan dalam penerapan teknologi, pengolahan data dan menambah *engagement* kepada tiap *stakeholder* serta membuat skala prioritas kegiatan berdasarkan program prioritas strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja
Direktorat Kelautan dan
Perikanan Tahun 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Yanti JS
Jabatan : Direktur Kelautan dan Perikanan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Rudiyanto
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Arifin Rudiyanto

Jakarta, November 2021
Pihak Pertama

Sri Yanti JS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran Strategis/Program:

1. Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional
3. Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner

NO	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Sasaran Strategis/Program 1: Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional		
	Indikator SS 1 : Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam		
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	% keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Kelautan dan Perikanan	80%
2.	Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)	a. % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Kelautan dan Perikanan	80%
		b. % kegiatan prioritas (output prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Kelautan dan Perikanan	80%
		c. % Rancangan Perpres RKP lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Deputi	100%
II.	Sasaran Strategis/Program 2: Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional		
	Indikator SS 2 : Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam		
1.	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Deputi	84-87,9%
2.	Kebijakan Percepatan Pembangunan	% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kelautan dan Perikanan	84-87,9%

NO	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
III.	Sasaran Strategis/Program 3: Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner		
	Indikator SS 3.1: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang akan oleh K/L Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam		
1.	Kebijakan Perencanaan Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kelautan dan Perikanan	88-90,9%
IV.	Sasaran Strategis/Program 3: Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner		
	Indikator SS 3.2 : Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam		
1.	Kebijakan Inovasi Pembangunan	% Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Deputi	80-84,9%

Kegiatan:
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan
• Satker ICCTF Pokja III

Anggaran:
Rp3.527.307.000,00
Rp76.579.804.000,00

Atasan Pimpinan Unit Kerja


Arifin Rudiyanto

Jakarta, November 2021
Pimpinan Unit Kerja


Sri Yanti JS



**LAPORAN
KINERJA (LKj)**
SATKER ICCTF
2021

Kedeputian Bidang Kemaritiman
dan Sumber Daya Alam

Januari 2022